

BAB IV

MOTIF REKONSTRUKSI *TRANS PACIFIC PARTNERSHIP* (TPP) OLEH JEPANG

Setelah keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan TPP, Jepang kemudian menginisiasi pertemuan dengan sepuluh negara anggota yang masih tersisa untuk kemudian merumuskan bentuk kemitraan yang baru berupa perjanjian kerja sama CPTPP pada tahun 2018. Sikap ini merupakan langkah yang diambil di luar dari kebiasaan Jepang sejak era pasca Perang Dingin, dimana Jepang seringkali menjadi negara kedua di bawah Amerika Serikat dalam setiap forum maupun kemitraan internasional. Sehingga dengan memakai landasan teori konstruktivisme oleh pemikiran Alexander E. Wendt dan Nicholas Onuf, fenomena irasional tersebut dapat dijelaskan melalui penggambaran struktur ide perdagangan bebas yang mampu mempengaruhi perubahan identitas dan kepentingan Jepang dalam kawasan Asia Pasifik melalui kemitraan CPTPP. Berikut penjabaran dari pengaplikasian landasan teori tersebut.

A. Struktur Ide Perdagangan Bebas

Menurut pandangan salah satu pakar Hubungan Internasional kelahiran Jerman, Alexander E. Wendt, konstruktivisme merupakan sebuah teori yang dapat menjelaskan sebuah fenomena dari struktur non material, yang bercirikan pada tiga hal. Pertama dalam menjelaskan tindakan kooperatif ataupun ofensif suatu negara, dapat dinilai sebagai hasil konstruksi dari struktur ide bangsanya (Hadiwinata, 2017). Struktur ide ini berupa norma, nilai, prinsip yang dianggap benar dari lingkungan dimana sebuah populasi tumbuh dan berkembang atau dikenal dengan sebutan interaksi antar-subjek, sehingga dapat dipengaruhi juga oleh aspek historis yang menentukan karakter politik negara dalam pergaulan global.

Kedua adalah ide- ide yang sudah terstruktur dari kehidupan sosialnya tidak hanya menimbulkan efek regulatif, melainkan juga konstitutif (Hadiwinata, 2017). Hal ini

menandakan adanya kemungkinan perubahan terhadap struktur ide yang awalnya dianggap benar menjadi kurang begitu benar, sehingga terdapat substitusi ide yang didasari pada perubahan nilai dan norma yang dianggap benar. Dalam perkembangannya setiap negara- bangsa memiliki peluang untuk memperbaharui definisi kepentingannya melalui proses interaksi dengan negara lain dalam pergaulan internasional.

Terakhir adalah struktur ide tadi dengan para aktornya atau setiap individu dalam masyarakat bersifat saling mempengaruhi satu sama lain (Hadiwinata, 2017). Struktur yang mempengaruhi sikap aktor dalam pembentukan identitas dan penetapan kepentingan, juga dipengaruhi oleh tindakan aktor dalam tetap membuktikan kebenaran struktur berdasarkan konstruksi nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakatnya. Keduanya saling memperkuat satu sama lain, karena ketika aktor beranggapan bahwa suatu kebiasaan adalah baik untuk dilakukan, maka kebiasaan tersebut akan semakin dianggap baik ketika aktor terus mempraktikannya dalam kehidupan sehari- hari.

Berdasarkan penjelasan mengenai struktur ide di atas, maka dapat dijadikan acuan dalam melihat fenomena perubahan sikap Jepang yang semula '*little brother*' Amerika Serikat menjadi *leader* dalam kemitraan perdagangan bebas multilateral di kawasan Asia Pasifik. Struktur ide yang paling tepat dalam menjelaskan keputusan Jepang untuk tetap menjadi anggota TPP dan berinisiatif untuk menjadi *leader* dalam perumusan kemitraan perdagangan bebas multilateral yang baru adalah mengenai struktur ide Jepang berupa perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan sebuah perdagangan yang dilakukan antar negara tanpa adanya hambatan domestik, seperti pajak masuk, kuota impor, dan subsidi produk dalam negeri.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, struktur ide dihasilkan dari proses belajar terhadap lingkungannya dimana ia tumbuh. Struktur ide tentang perdagangan bebas juga didapat oleh bangsa Jepang juga hasil dari sosialisasi dengan masyarakat dalam negeri dan juga masyarakat internasional. Untuk pertama kalinya Jepang mengerti arti pentingnya

sebuah perdagangan bebas dari ancaman Comodor Perry pada tahun 1853 dengan instrumen perang persenjataan lengkap dan *'black ships'*. Masyarakat Jepang terutama para kelompok pebisnis memaksa pemerintahan untuk segera mengubah kebijakan *sakoku* menjadi lebih terbuka. Awalnya hanya untuk menyelamatkan bangsa agar tidak diserang dan dijajah seperti bangsa Asia lainnya, akan tetapi semakin hari Jepang jadi belajar arti pentingnya membuka diri bagi negara lain untuk menciptakan peluang dari hubungan simbiosis mutualisme.

Dari peristiwa tersebut Jepang memahami bagaimana potensi bahan baku melimpah yang mereka miliki ternyata bernilai bagi negara lain dan mampu untuk dipasarkan. Tidak hanya itu, setelah mengalami keuntungan dari perdagangan pabrik dan galangan kapal yang dijual murah terhadap swasta pada era Restorasi Meiji, Jepang juga mempelajari bahwa negaranya tidak hanya memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun juga sumber daya manusia yang produktif. Pada saat itu banyak bahan baku yang dapat bangsa Jepang olah menjadi bahan siap pakai yang bernilai jauh lebih tinggi dari bahan mentah tadi. Sehingga dengan biaya produksi yang kecil, bangsa Jepang mampu mengubah bahan mentah menjadi bahan yang memiliki harga jual tinggi di pasaran. Hal ini juga yang menyebabkan adanya keajaiban perekonomian Jepang pada tahun 1960- 1970 an dalam memulihkan perekonomian pasca kekalahannya dalam Perang Dunia II (Eiji, 2007).

Dalam konteks Jepang, struktur ide tentang perdagangan bebas dapat dikategorikan sebagai struktur dan negara bangsa Jepang adalah agen. Sebagaimana pendapat Wendt yang mengatakan bahwa terdapat hubungan timbal balik yang saling menguatkan antara struktur dan agen, maka pada awal kedatangan ancaman Comodor Perry tahun 1853 yang menjadi ancaman bagi Jepang dan memaksanya untuk membuka diri dan melakukan praktik perdagangan bebas, berubah menjadi sebuah kebiasaan yang telah terstruktur dalam perkembangan masyarakat Jepang. Karena dalam proses belajarnya, perdagangan bebas lebih banyak mendatangkan keuntungan dan keberhasilan dalam mengatasi permasalahan

ekonomi dalam negeri Jepang. Perdagangan bebas menjadi suatu ide yang dianggap benar dalam mendatangkan profit bagi perekonomian negara. Oleh sebab itu, seiring berjalannya waktu perdagangan bebas dijadikan sebagai *trade mark* dalam menentukan kebijakan luar negerinya.

Dalam pengambilan keputusan di Jepang terdapat tradisi yang mengikutsertakan pertimbangan kelompok pebisnis dalam pengambilan keputusan terutama terkait perekonomian negara. Kelompok pebisnis memiliki porsi yang sangat krusial, bahkan lebih besar dari badan eksekutif dan badan legislatif, dalam memberikan pengaruhnya terhadap pembuatan kebijakan dikarenakan subjek dan sekaligus objek yang merasakan langsung dari dampak kebijakan ekonomi adalah golongan ini (Takashi & Jain, 2000, hlm. 13). Selain disebabkan oleh suara yang diberikan pada calon legislatif dalam pemilihan sebagian besar berasal dari kelompok pebisnis, tradisi ini juga dikarenakan kelompok pebisnis merupakan tokoh penting untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan perekonomian Jepang.

Pada era Restorasi Meiji, kelompok pebisnis lah yang meyakinkan masyarakat dan pemerintah Jepang untuk membuka diri terhadap perdagangan dengan negara lain, terutama dari Inggris dan Amerika Serikat (Tjeng, 1983, hlm. 349). Kelompok pebisnis membuat aliansi untuk mendesak pemerintah Jepang berganti menjadi kekaisaran kembali dan meningkatkan kemakmuran bangsa dengan menjalankan kebijakan luar negeri perdagangan bebas. Setelah pemerintah memutuskan untuk mengubah arah kebijakan menjadi terbuka, kelompok pebisnis pula yang mampu menyelaraskan keinginan masyarakat dengan pemerintah dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung serta berpartisipasi aktif terhadap pembangunan perekonomian negara yang pada saat itu mengalami perubahan drastis akibat ancaman dari negara Barat (Tjeng, 1983, hlm. 350).

Oleh sebab itu hingga saat ini Jepang masih memberikan tempat yang sangat spesial bagi pemikiran kelompok pebisnis terhadap penentuan kebijakan nasional maupun internasional. Kelompok pebisnis terbagi menjadi

dua, yaitu *gyokai* (*sectoral world*) dan *zaikai* (*business world*) (Takashi & Jain, 2000, hlm. 14). *Gyokai* merupakan kelompok pebisnis yang bergerak dalam sektor industri dan kepentingan lain berdasarkan sektor, seperti sektor pertanian. Sedangkan *zaikai* merupakan organisasi induk di kalangan bisnis komersial dan dibagi menjadi empat kelompok perusahaan-perusahaan besar. Selain kelompok pebisnis tersebut, terdapat kelompok pebisnis swasta yang paling berpengaruh di Jepang, yang bernama kelompok *keiretsuka* (Takashi & Jain, 2000, hlm. 14). Kelompok *keiretsuka* adalah sejenis korporasi multinasional yang memiliki cabang di berbagai wilayah. *Keiretsuka* memiliki pengaruh yang sangat besar terutama dalam memberikan pendapatnya terhadap *decision making process* Jepang di bidang industri dan bisnis. Dikarenakan pengaruhnya pada suprastruktur politik dalam pengambilan keputusan, maka *keiretsuka* dapat juga berperan sebagai kelompok penekan.

Berkaitan dengan pembahasan kelompok penekan, salah satu kelompok pebisnis *zaikai*, yaitu *keidanren* (*Federation of Economic Organisation*) merupakan pendonor utama dalam pendanaan partai politik besar *Liberal Democratic Party* (LDP). Sedangkan posisi partai LDP dalam konstitusi Jepang termasuk krusial, yaitu sebagai partai politik yang paling berpengaruh dalam Diet atau Parlemen Nasional yang merupakan satu-satunya organ pembuat hukum (Takashi & Jain, 2000, hlm. 11). Sehingga jika partai politik LDP tidak mengakomodasikan kepentingan dari kelompok pebisnis dalam menjalankan kebijakan perdagangan bebas, maka finansial partai akan terganggu dan suara dalam pemilihan selanjutnya akan sangat berisiko.

Selain kelompok pebisnis, birokrasi Jepang juga memiliki keistimewaan dalam pengambilan keputusan terutama jika berkaitan dengan kebijakan perekonomian. Birokrasi Jepang terdiri dari 14 menteri negara yang membantu Perdana Menteri dalam badan eksekutif (Takashi & Jain, 2000, hlm. 8). Akan tetapi salah satu menteri yang paling mendominasi dalam pengambilan kebijakan adalah Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (*Ministry on Economic,*

Trade, and Industry). Dalam menjalankan fungsinya birokrasi bekerja berdasarkan sistem *tatewari gyosei* (*vertically divided administration*), dimana dalam mengurus urusan yang bersifat teknis masing- masing lembaga kementerian diberi kebebasan untuk bertindak sendiri- sendiri (Takashi & Jain, 2000, hlm. 8). Sehingga ketika Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri menyetujui keanggotaan Jepang dalam sebuah kemitraan perdagangan bebas multilateral, dan jika hal tersebut tidak begitu menyenangkan bagi Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, maka hal tersebut akan tetap berjalan berdasarkan sistem *tatewari gyosei*.

Kemudian dalam penjelasan lanjut, Wendt berpendapat bahwa struktur ide dapat berubah sewaktu- waktu sesuai dengan kondisi lingkungan. Ketika Jepang yang merupakan '*little brother*' Amerika Serikat dalam mengikuti sebuah kemitraan perdagangan bebas di Asia Pasifik, kemudian mengambil langkah menjadi *leader* dalam perumusan CPTPP setelah keluarnya Amerika Serikat dari TPP tahun 2017. Maka fenomena tersebut menggambarkan adanya perubahan nilai terhadap struktur ide '*little brother*' Amerika Serikat yang menjadikan Jepang cenderung bertindak pasif dan reaktif dalam kawasan Asia Pasifik. Ketika keputusan Presiden Donald Trump untuk melakukan kebijakan proteksionisme dalam pergaulan internasional, merupakan sesuatu yang bertolak belakang dengan struktur ide perdagangan bebas Jepang, maka ia mengambil sikap lain yaitu dengan menjadi *leader* dalam kemitraan TPP. Keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan TPP memberikan peluang bagi Jepang untuk menciptakan pasar bebas di Asia Pasifik yang sesuai dengan kepentingan Jepang. Struktur ide *follower* Amerika Serikat yang cenderung menjadikan Jepang sebagai negara pasif dan reaktif dalam kawasan Asia Pasifik kemudian berganti menjadi sikap yang positif dan proaktif dalam menjalankan nasionalisme ekonominya. Hal ini disebabkan oleh struktur ide perdagangan bebas merupakan struktur domestik yang lebih normatif jika dibandingkan dengan ide '*little brother*' Amerika Serikat. Namun dalam perkembangan dunia internasional, struktur ide perdagangan bebas Jepang

semakin diperkuat oleh dua faktor berikut, yaitu faktor eksternal dan internal.

1. Faktor Eksternal

Abad ke 21 merupakan era dimana perpindahan manusia, barang, dan jasa bergerak sangat bebas hampir tidak mengenali batasan wilayah. Segala sesuatu terjadi sangat instan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi. Dunia telah mengalami globalisasi, begitu juga dengan perkembangan ekonomi yang berjalan dalam sebuah sistem lebih besar dengan ketergantungan dari beberapa unit antar negara (Ohmae, 1987, hlm. 123). Kemungkinan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat hanya dengan mengandalkan sumber daya alam dan kapabilitas manusia dalam negeri adalah mustahil. Dalam lingkungan globalisasi terdapat kebutuhan untuk bekerja sama tidak hanya antar negara tapi juga masyarakatnya. Begitu juga dengan kebutuhan terhadap pasar dalam memenuhi kebutuhan dasar nasional, setiap negara dapat mewujudkannya dengan membentuk suatu kemitraan pasar bebas maupun kerjasama bilateral. Namun dengan semakin berkembangnya teknologi dan komunikasi, dibutuhkan sesuatu yang lebih praktis dalam memasok barang dan menciptakan permintaan dengan meminimalisir anggaran yaitu dengan berkerja sama dalam interdependensi.

Dalam era globalisasi, terdapat ungkapan globalisasi spontan yang berarti integrasi dan interdependensi ekonomi melalui penguatan pasar dari hasil perkembangan teknologi dan kapitalisme dunia (Takashi & Jain, 2000, hlm. 66). Penyebaran global yang bersifat spontan ini semakin bertumbuh seiring dengan berkembangnya perusahaan multinasional, pergerakan faktor produksi, jaringan transnasional dari transaksi finansial dan modal, dalam ruang lingkup internasional. Setiap negara memiliki beberapa kemungkinan terhadap globalisasi spontan, baik dengan menentang, beradaptasi, mengakomodasi kekuatan yang lebih besar atau justru merestrukturasinya (Takashi & Jain, 2000,

hlm. 67). Pilihan tersebut timbul akibat tidak adanya jaminan globalisasi spontan sebagai suatu alternatif yang benar-benar diperlukan dan cocok bagi semua negara, mengingat kondisi domestik yang berbeda.

Pertimbangan lain dari pilihan tersebut adalah bahwa fenomena globalisasi spontan tidak selalu memberikan dampak yang positif dan memaksimalkan keuntungan, justru dalam beberapa insiden akan dapat mempersulit kondisi dalam negeri suatu negara. Dalam prosesnya, globalisasi spontan cenderung menggantungkan kepentingan bersama dalam pasar internasional, sehingga akan sangat bergantung pada stabilitas pasar komoditas internasional dan penularan inflasi lintas batas (Takashi & Jain, 2000, hlm. 66). Sehingga untuk mengantisipasi globalisasi produksi oleh perusahaan multilateral yang dapat merusak kedaulatan ekonomi negara tuan rumah dengan menumbuhkan ketergantungan struktural, maka Jepang perlu mengambil langkah sebagai *leader* dalam kemitraan CPTPP. Hal ini dilakukan dengan cara merumuskan ulang regulasi agar lebih menguntungkan bagi stabilitas Jepang dan meyakinkan negara-negara anggota TPP lainnya untuk tetap merealisasikan kemitraan perdagangan bebas multilateral dalam kawasan Asia Pasifik.

2. Faktor Internal

Selain faktor eksternal berupa globalisasi spontan, terdapat pula opini publik yang tumbuh dalam masyarakat Jepang terkait hubungan Jepang dengan Amerika Serikat dan global pasca Perang Dingin. Opini publik ini memberikan alternatif sikap Jepang dalam menanggapi isu globalisasi pada abad ke- 21, terutama perjanjian kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat, peran dalam kawasan Asia, dan hubungan dengan China serta Rusia (Takashi & Jain, 2000, hlm. 180). Kejadian masa lampau terkait persepsi nasional Jepang yaitu *fukoku kyohei*, yaitu negara kuat adalah negara yang membangun kekuatan militer yang kuat pula, telah membuat mayoritas masyarakat Jepang untuk tidak menginginkan adanya amandemen konstitusi pasal 9 mengenai pembangunan

pertahanan aktif (Takashi & Jain, 2000, hlm. 68). Sehingga pandangan pasifis lebih dominan dan terbagi menjadi tiga pandangan utama, yaitu pandangan globalis, regionalis, dan nasionalis.

Ketiganya menyetujui adanya kerjasama dengan Amerika Serikat dalam bidang pertahanan dan keamanan. Hal ini dinilai sangat cocok dengan keadaan Jepang pada saat ini untuk menghindari citra buruk mengenai kolonialisme pada masa Perang Dunia II, terutama dalam kawasan Asia (Takashi & Jain, 2000, hlm. 183). Selain itu Jepang juga dapat mengalokasikan anggaran pembentukan pertahanan nasional yang aktif, kepada partisipasi global dan pertumbuhan ekonomi nasional. Partisipasi global yang dilakukan Jepang dapat direalisasikan dalam aspek lingkungan, pembelaan Hak Asasi Manusia (HAM), maupun bantuan dana bagi negara berkembang (Takashi & Jain, 2000, hlm. 184). Namun kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat tidak menutup kemungkinan adanya kemitraan dalam membentuk keamanan kolektif dalam kawasan, seperti Asia Pasifik. Hal ini tidak bermaksud untuk menggantikan peranan Amerika Serikat, akan tetapi lebih kepada penambahan nilai kebutuhan dalam membangun kepercayaan dalam integrasi kawasan.

Sedangkan perbedaannya terletak pada intensitas interaksi Jepang dengan negara-negara dalam sebuah kerja sama kawasan. Pandangan globalis beranggapan bahwa perkembangan ekonomi dalam era globalisasi akan mengarahkan interdependensi ekonomi internasional kepada sebuah perdamaian global (Takashi & Jain, 2000, hlm. 181). Sehingga negara-negara kawasan Asia Pasifik dapat mengemukakan pandangan regionalnya masing-masing dalam sebuah forum kerja sama untuk meningkatkan integrasi ekonomi multilateral dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian regional. Pendapat ini didukung oleh pandangan regionalis namun dengan upaya lebih intens dalam menjalin kerja sama terhadap negara lain, seperti China.

Kemudian pandangan nasionalis lebih mengarah pada pandangan untuk menanggapi kritik internasional terhadap Jepang yang dinilai tidak terlalu aktif dalam pergaulan

internasional dan hanya fokus pada kemakmuran nasional. Pandangan ini menjelaskan sikap Jepang yang dapat berubah-ubah mengikuti situasi internasional. Akan tetapi fokus kebijakan Jepang selalu berkaitan dengan tiga hal, yaitu konsentrasi terhadap *partner* global Amerika Serikat dan Uni Eropa, menginvestasikan dana untuk rekonsiliasi dan akomodasi negara tetangga di kawasan Asia, dan penentuan identitas pasca Perang Dingin (Takashi & Jain, 2000, hlm. 182).

Dapat disimpulkan dari ketiga pandangan tersebut bahwa Amerika Serikat pada hakikatnya merupakan *partner* kerja sama Jepang, terutama dalam bidang keamanan. Namun dalam era globalisasi Amerika Serikat bukanlah sebuah negara *superpower* yang mampu menghegemoni dunia. Globalisasi menurut masyarakat Jepang merupakan era pembagian kekuatan dalam bentuk kapasitas dan tanggung jawab antar negara- negara besar. Sehingga dalam globalisasi, semua negara memiliki peran yang berpengaruh dan kesempatan yang besar untuk menyebarkan nilai yang dianggapnya baik bagi penataan dunia.

B. Identitas

Setelah mengetahui betapa besarnya pengaruh struktur ide perdagangan bebas yang dimiliki Jepang terhadap perubahan sikapnya untuk tidak mengikuti pola kebijakan proteksionisme Amerika Serikat terhadap kemitraan TPP, maka tahapan selanjutnya adalah penjabaran identitas baru dari pengaruh struktur ide yang dimiliki Jepang terhadap kawasan Asia Pasifik. Jepang tidak hanya menunjukkan sikap penolakan terhadap kebijakan proteksionisme oleh Amerika Serikat, namun juga memilih langkah inisiatif dalam menunjukkan kemampuannya sebagai *leader* dari perumusan kemitraan TPP yang baru.

Pada bulan Januari 2017, setelah terpilihnya Presiden Donald Trump sebagai pemimpin baru Amerika Serikat, ia mengumumkan secara resmi keluarnya Amerika Serikat dari kemitraan TPP dengan alasan perlindungan tenaga kerja

domestik (Cable News Network, 2017). Keluarnya Amerika Serikat menimbulkan skeptis yang luar biasa dari para pakar ekonomi dunia terhadap keberhasilan TPP. Selain dari menurunnya jumlah keuntungan bagi negara-negara anggota, TPP juga sudah mendapat kecaman dunia setelah penerbitan ilegal oleh *wikileaks* mengenai data regulasi kemitraan TPP yang sangat merugikan tenaga kerja nasional (Takenaka, 2016). Kemitraan TPP menjadi tidak menarik lagi bagi negara-negara Asia yang juga tergabung dalam forum kerja sama APEC untuk bergabung dengan TPP. Masyarakat domestik negara-negara anggota juga mendukung tindakan negaranya untuk mengikuti langkah Presiden Donald Trump dikarenakan tidak adanya keberpihakan TPP terhadap kemakmuran pengusaha kecil domestik (Guardian, 2015).

Di tengah situasi internasional yang rumit terhadap penerimaan TPP, Jepang di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe mengambil sikap untuk tetap mempertahankan keanggotaannya dan mencoba mengadakan pertemuan dengan sepuluh negara anggota lainnya untuk menindaklanjuti TPP (Mulgan, 2017). Sebelas negara kemudian bertemu dalam KTT APEC di Vietnam pada November 2017 dan menghasilkan keputusan untuk tetap mempertahankan status anggotanya dan merumuskan kembali TPP menjadi sebuah kemitraan yang dapat menjawab berbagai tantangan globalisasi dan memperhatikan hak tenaga kerja lokal (Sposato, 2017).

Perumusan perjanjian yang baru dilaksanakan dalam kurun waktu dua bulan setelah pertemuan pertama sebelas negara anggota pasca keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan. Perumusan ini ditandatangani di Tokyo dengan nama yang baru yaitu *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans pacific Partnership* (CPTPP) oleh Jepang, Australia, Selandia Baru, Kanada, Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Chili, Peru, dan Meksiko (Funabashi, 2018). Selanjutnya perjanjian CPTPP memasuki tahapan baru yaitu pengesahan dengan penandatanganan dari semua negara anggota yang diwakili oleh kementerian negara di Santiago pada tanggal 8 Maret 2018 (McDonald, 2018).

Untuk memperlihatkan konsistensinya sebagai *leader* dalam kemitraan CPTPP, maka pada bulan Juli 2018 Jepang meratifikasi perjanjian tersebut setelah ratifikasi pertama dilakukan oleh Meksiko sebulan setelah penandatanganan di Chili (Funabashi, 2018).

Dalam perumusan kemitraan Asia Pasifik yang baru, Jepang mengatur beberapa regulasi yang sudah mengalami pembaharuan di dalam CPTPP untuk meyakinkan sepuluh negara anggota akan keberhasilan perjanjian tersebut. Perubahan regulasi ini juga diharapkan dapat mengakomodir keraguan negara-negara non anggota untuk bergabung serta meyakinkan masyarakat internasional bahwa kemitraan Asia Pasifik kini telah ramah akan tenaga kerja lokal. Perubahan regulasi dalam CPTPP membahas topik berbagai masalah pemotongan tarif dan hambatan non tarif, ketenagakerjaan, lingkungan, hak asasi manusia, hak kekayaan intelektual (Eunseo, 2018). Menurut Menteri Negara untuk Kebijakan Ekonomi dan Fiskal, Toshimitsu Motegi, perjanjian CPTPP akan mulai diberlakukan pada tanggal 30 Desember mendatang, dikarenakan perubahan peraturan ini menyangkut segala aspek dalam kebijakan nasional, maka masih membutuhkan waktu bagi tiap negara anggota untuk meratifikasinya (Eunseo, 2018).

Untuk menunggu masa ratifikasi dari beberapa negara anggota, Perdana Menteri Shinzo Abe melakukan berbagai pendekatan kerja sama bilateral kepada beberapa negara dengan memberikan tawaran untuk bergabung dengan CPTPP (Funabashi, 2018). Perjanjian CPTPP merupakan sebuah kemitraan besar perdagangan bebas multilateral pertama yang sudah disepakati dan memiliki regulasi yang jelas serta transparan dalam menjawab tantangan globalisasi abad ke-21. Setelah keberhasilannya dalam mengarahkan sepuluh negara anggota TPP yang tersisa untuk menyepakati perjanjian baru CPTPP, Jepang menjadi negara yang memiliki kapabilitas baru dalam memperlihatkan kepemimpinannya dalam kawasan Asia-Pasifik (Eunseo, 2018).

Setelah membuktikan kemampuannya dalam memanfaatkan multilateralisme strategis dari CPTPP, Jepang

mampu menarik ketertarikan China dalam membentuk rezim perekonomian yang setara tanpa keterlibatan WTO (*World Trade Organization*) (Eunseo, 2018). Prediksi para pakar ekonomi terhadap ketidakstabilan kawasan Asia pasifik pasca kebijakan proteksionisme Amerika Serikat kini dapat terbantahkan dengan adanya kemungkinan China untuk bergabung dengan CPTPP (Eunseo, 2018). Tidak hanya itu, regulasi dalam CPTPP yang sudah disepakati juga mampu dijadikan sebagai *role model* dalam *framework* pembuatan perjanjian multilateral lain termasuk Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (*Regional Comprehensive Economic Partnership*- RCEP) yang dipimpin ASEAN, memperkuat dampak Jepang pada negosiasi RCEP sebagai penasihat (Eunseo, 2018).

Jepang juga berhasil membuat kesepakatan dengan Uni Eropa dalam perjanjian EU- Japan EPA (*Economic Partnership Agreement*) pada bulan Juli 2018 (Eunseo, 2018). Perjanjian ini merupakan bentuk penolakan antara dua partner dagang besar Amerika Serikat terhadap kebijakan proteksionisme Presiden Donald Trump. Perjanjian CPTPP dapat digunakan Jepang sebagai bentuk dari realisasi kekuatan ekonomi dan diplomasi di kawasan Asia Pasifik. Dengan statusnya sebagai *leader* dalam kemitraan CPTPP, Jepang berusaha untuk memperluas jangkauan pertumbuhannya hingga ke beberapa negara yang sebelumnya tidak menjalin kerja sama secara intens. Dan melalui CPTPP, Jepang dapat mencapai target jumlah investasi luar negeri langsung (*Foreign Direct Investment*) pada tahun 2020 (Eunseo, 2018).

C. Kepentingan

Dalam penggambaran identitas sebelumnya, Jepang berinisiasi secara tanggap untuk menjadi pemimpin dalam perumusan kemitraan kawasan Asia Pasifik yang baru. Kemitraan ini tidak hanya mencakup penghapusan tarif dan non tarif saja, tetapi juga berbagai bidang seperti investasi, perdagangan jasa, hak kekayaan intelektual, perusahaan milik negara dan perdagangan elektronik. Perjanjian ini akan

menjadi dasar bagi perusahaan Jepang untuk membangun rantai nilai yang maju dan memberikan kontribusi mencolok terhadap pertumbuhan ekonomi Jepang (Sposato, 2017). Sehingga seluruh parlemen Jepang berupaya maksimal untuk menyelesaikan prosedur yang diperlukan dalam penandatanganan dan pemberlakuan CPTPP sesegera mungkin untuk memenuhi harapan yang tinggi dari industri Jepang.

Menurut Kim Eunseo, seorang peneliti dari lembaga penelitian *Stimson Center's Japan Program*, Jepang adalah sebuah negara yang akan menerima banyak sekali keuntungan dari perjanjian CPTPP, baik domestik maupun internasional. Dalam dunia internasional perjanjian CPTPP merupakan satu-satunya perjanjian kemitraan multilateral kawasan yang telah disepakati oleh sebelas negara anggotanya dalam membuat regulasi baru mengenai ketenagakerjaan, pertimbangan terhadap pelestarian lingkungan, dan juga kekayaan hak intelektual. Sehingga sebagai perjanjian yang sudah disepakati dengan aturan yang mengikuti standar internasional, perjanjian tersebut akan menjadi tolak ukur dalam menentukan aturan bagi perdagangan multilateral kawasan yang sejenis, seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) di ASEAN (Eunseo, 2018).

Hal ini tentu saja akan memperkuat posisi Jepang pada negosiasi perjanjian kawasan serupa terutama RCEP di ASEAN. Bahkan dalam sebuah wawancara dengan para wartawan setelah mengadakan pertemuan dengan sepuluh perwakilan negara anggota CPTPP di Tokyo, Menteri Revitalisasi Ekonomi Jepang Toshimitsu Motegi, menegaskan peran Jepang dalam merealisasikan perjanjian CPTPP pada akhir tahun 2018. Ia mengatakan bahwa Jepang akan konsisten dalam mengambil peran utama untuk mengupayakan realisasi kemitraan CPTPP secepat mungkin, setelah menerima laporan mengenai kondisi dalam negeri dari negara anggota (Asia Nikkei, 2018). Selain itu Menteri Motegi mengatakan secara eksplisit mengenai status kemitraan CPTPP untuk menciptakan arsitektur yang bebas dan adil berdasarkan aturan baru dan mengirimkan pesan kuat kepada dunia bahwa proteksionisme akan merugikan perekonomian nasional (Asia

Nikkei, 2018). Oleh sebab itu, perjanjian CPTPP dapat dijadikan alat bagi Jepang untuk mendapatkan pengakuan global terhadap peran utamanya di kawasan Asia Pasifik setelah kebijakan proteksionisme Amerika Serikat.

Selain untuk memperlihatkan kemampuan Jepang dalam menunjukkan identitasnya dalam pergaulan ekonomi dan politik internasional, Jepang sedang berusaha untuk meningkatkan prospek pertumbuhannya (Eunseo, 2018). Prospek ini dapat dicapai melalui investasi secara langsung dan peningkatan sektor ekspor. Dengan gabungan GDP sebesar \$10 triliun dari anggota CPTPP, Jepang dapat menggandakan saham investasi langsungnya pada tahun 2020 yang sesuai dengan tujuan pemerintahan PM Shinzo Abe melalui kebijakan *abenomics* (Eunseo, 2018). Hal ini yang akan mempertahankan Jepang untuk meningkatkan peran utamanya dalam CPTPP pada peluang kerja, bakat asing dan inovasi baru.

Menurut data dari statistik perdagangan internasional PBB (*United Nations International Trade Statistic Database-UN Comtrade*), jumlah ekspor yang dilakukan Jepang ke berbagai benua lebih kecil jika dibandingkan dengan angka impor (UN- Comtrade, 2016). Data ekspor yang lebih besar hanya terdapat pada kawasan Amerika Utara sebesar 24%. Berikut daftar tabel ekspor dan impor Jepang ke berbagai wilayah pada tahun 2016.

Kawasan	Persentase Ekspor	Persentase Impor
Asia	56	61
North America	24	14
Europe	14	16
Oceania	2.8	5.2
South America	1.9	2.4
Africa	1.3	1.4

Tabel 4.1: Perbandingan Ekspor- Impor Jepang Tahun 2016

Sumber : UN- Comtrade 2016

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah ekspor Jepang masih relatif kecil jika dibandingkan dengan produk yang mereka impor dari luar

negeri. Hal ini akan sangat mempengaruhi neraca perdagangan Jepang sehingga adanya kemitraan CPTPP dalam mewujudkan perdagangan bebas multilateralisme yang inovatif, diharapkan mampu memperluas pasar dan meningkatkan jumlah produk ekspor Jepang di berbagai kawasan. Selain data tersebut, terdapat pula akumulasi data dari jumlah ekspor dan impor Jepang terhadap negara- negara anggota CPTPP pada tahun 2016 untuk memperkuat hipotesa kepentingan peningkatan ekspor Jepang dalam keanggotaannya di CPTPP. Berikut merupakan data ekspor dan impor Jepang terhadap sepuluh negara anggota CPTPP.

Negara	Persentase Jumlah Ekspor	Jenis Komoditas	Persentase Jumlah Impor	Jenis Komoditas
Chili	0.28	Transportasi, mesin, produk mineral	0.90	Produk hewan, produk kayu, makanan
Peru	0.15	Transportasi, mesin, produk mineral	0.28	Metal, makanan, produk mineral
Selandia Baru	0.36	Metal, transportasi, mesin	0.39	Produk kimia, hewan, kayu
Australia	2.1	Transportasi, mesin, produk mineral	4.7	Produk hewani, makanan, mineral
Vietnam	1.8	Mesin, metal, produk kimia	2.8	Mesin, tekstil, pakaian
Malaysia	1.8	Mesin, transportasi, metal	2.8	Produk mineral, metal, kayu
Brunei Darussalam	0.019	Transportasi, mesin, metal	0.28	Produk mineral
Singapura	2.8	Mesin, transportasi, produk kimia	1.4	Produk mineral, metal, makanan
Kanada	1.6	Transportasi, mesin, metal	1.5	Produk mineral, hewan, kayu
Meksiko	2.2	Mesin, transportasi, metal	0.94	Produk mineral

Tabel 4.2: Perbandingan Ekspor- Impor Jepang di Negara CPTPP Tahun 2016

Sumber : UN- Comtrade 2016

Pada pemaparan data pada tabel kedua, terlihat terdapat perbandingan yang cukup signifikan dari jumlah negara yang cenderung melakukan impor kepada Jepang daripada ekspor Jepang terhadap sepuluh negara anggota tersebut. Jika diambil jumlah rata-rata perbandingan ekspor dan impor, maka dari sepuluh negara tersebut terdapat tujuh diantaranya yang mengalami jumlah ekspor jauh lebih kecil dua kali lipat dari jumlah impornya kepada Jepang. Hal ini memperlihatkan kurangnya intensitas kerjasama diantara kedua negara sehingga dengan adanya perjanjian kemitraan CPTPP, segala hambatan tarif dan non-tarif dapat dikurangi.

Jepang mengupayakan adanya keseimbangan perdagangan dengan negara-negara anggota CPTPP. Ia berusaha menciptakan prinsip saling ketergantungan akan kebutuhan produk dan pemecahan masalah regional masing-masing. Sehingga target aspek yang berusaha untuk dipenuhi tidak hanya berkisar pada nilai ekspor yang lebih murah dan perluasan pasar impor, akan tetapi juga memenuhi defisit dan surplus perdagangan internasional. Jenis komoditas yang dibutuhkan Jepang masih berkisar bahan mentah bagi industri seperti produk kayu dan mineral. Sedangkan pasar ekspor Jepang adalah barang-barang manufaktur seperti elektronik, mesin, dan transportasi (UN- Comtrade, 2016).

Perjanjian CPTPP yang berbasis perdagangan bebas multilateral tidak hanya menutup kerja sama dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik, namun juga membuka kesempatan keanggotaan bagi semua negara. Jepang merasa perlu membuka perluasan terutama bagi negara-negara yang memiliki perekonomian kurang stabil untuk membuka peluang lebih besar bagi pembuatan keseimbangan perdagangan dengan negara tersebut. Jepang juga mempertimbangkan kemungkinan adanya kenaikan impor dalam produksi produk bernilai tambah serta kemungkinan lainnya agar tidak selalu mengandalkan bahan mentah, mengingat perdagangan bebas merupakan arus bebas pertukaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja.